

**MENGANALISIS VIDEO “DEMOKRASI ITU GADUH, TAPI KENAPA BERTAHAN
DAN DIANUT BANYAK NEGARA?”**

Mata Kuliah : MKU PKN
Program Studi : S1 PGSD
Semester/Kelas : 2/F
Dosen Pengampu : 1. Roy Kembar Habibi M.Pd



Disusun Oleh:

Qonita Mardhia Suhendro (2413053193)

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG 2025**

Demokrasi pada dasarnya memang identik dengan suasana yang gaduh, karena sistem ini membuka ruang seluas-luasnya bagi setiap individu untuk menyuarakan pendapat, gagasan, bahkan kritik terhadap kebijakan publik dan para pemangku kekuasaan. Tidak seperti sistem otoriter yang cenderung menekan perbedaan dan menyamakan suara, demokrasi justru tumbuh dari keberagaman pandangan. Akibatnya, dalam praktiknya demokrasi terlihat penuh perdebatan, saling sanggah, bahkan kericuhan dalam ruang-ruang publik—baik fisik maupun digital. Namun, kegaduhan ini bukan pertanda kelemahan, melainkan kekuatan utama demokrasi. Justru dari perbedaan dan adu gagasan itulah lahir keputusan-keputusan yang lebih matang dan mewakili banyak kepentingan. Demokrasi mengasah masyarakat untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi penutur aktif dalam perjalanan politik bangsa. Dalam kebisingan demokrasi, terbentuk proses negosiasi dan kompromi yang mencerminkan semangat partisipatif dan kolektif dalam menentukan arah kehidupan bersama.

Di balik kesan kacau dan gaduh yang sering menyelimuti demokrasi, terdapat manfaat besar yang bersifat jangka panjang dan sangat signifikan bagi suatu negara. Demokrasi memungkinkan terbentuknya sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel, di mana kekuasaan tidak terpusat pada satu tangan saja, melainkan diawasi dan dikontrol oleh berbagai elemen masyarakat. Negara-negara yang menganut demokrasi cenderung memiliki perlindungan hak asasi manusia yang lebih kuat, karena kebebasan berekspresi, beragama, berkumpul, dan berpendapat menjadi bagian penting dari sistem tersebut. Selain itu, sistem demokrasi yang terbuka terhadap kritik dan partisipasi publik mendorong berkurangnya praktik korupsi, karena pejabat publik dapat dikritisi dan diadili oleh hukum maupun opini publik. Demokrasi juga berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera dan bahagia, karena setiap individu merasa memiliki ruang untuk bersuara dan turut menentukan masa depan negaranya. Dalam jangka panjang, demokrasi menciptakan stabilitas politik dan sosial yang berkesinambungan karena keputusan-keputusan besar lahir dari proses musyawarah, bukan paksaan. Maka dari itu, meski tampak gaduh di permukaan, demokrasi menyimpan kekuatan besar untuk membangun bangsa yang adil, sejahtera, dan manusiawi.

Memasuki abad ke-21, demokrasi dihadapkan pada tantangan baru yang cukup serius dan kompleks. Meskipun demokrasi telah lama dipuji sebagai sistem pemerintahan yang ideal, kenyataannya banyak negara mulai mengalami penurunan kualitas demokrasi. Salah satu tantangan utama yang muncul adalah munculnya para pemimpin populis—tokoh-tokoh yang naik ke tampuk kekuasaan dengan memainkan emosi massa, membangun narasi “kami versus mereka,” dan sering kali mengabaikan fakta ilmiah serta prinsip-prinsip rasional dalam pengambilan kebijakan. Pemimpin semacam ini cenderung anti-sains, tidak terbuka terhadap kritik, dan bahkan membatasi kebebasan berpendapat, baik melalui pengawasan media maupun penindasan terhadap kelompok oposisi. Hal ini berakibat langsung pada menurunnya indeks demokrasi global yang diukur oleh lembaga-lembaga internasional, termasuk di negara-negara yang dulunya dianggap sebagai panutan demokrasi dunia seperti Amerika Serikat, India, dan beberapa negara Eropa. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa demokrasi bukan sistem yang bisa dibiarkan berjalan begitu saja; ia harus terus dijaga dan diperjuangkan. Jika tidak, maka

demokrasi bisa secara perlahan-lahan berubah menjadi otoritarianisme yang dibungkus dalam kemasan demokratis semu. Tantangan ini menuntut kesadaran dan keterlibatan aktif dari seluruh masyarakat agar nilai-nilai demokrasi tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sesuai dengan semangat zaman.

Indonesia, meskipun dikenal sebagai salah satu negara demokratis terbesar di dunia dengan jumlah pemilih yang besar dan pelaksanaan pemilu langsung, nyatanya mengalami kemunduran dalam kualitas demokrasi dalam beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 2013, berbagai laporan internasional seperti Freedom House mencatat penurunan skor indeks demokrasi Indonesia, yang menandakan melemahnya aspek-aspek penting dalam demokrasi seperti kebebasan sipil, kebebasan pers, dan independensi lembaga negara. Lebih lanjut, The Economist Intelligence Unit mengklasifikasikan Indonesia sebagai “flawed democracy” atau demokrasi cacat, yang berarti negara ini memang memiliki institusi demokratis namun belum mampu menjalankannya secara substantif dan menyeluruh. Cacat tersebut tampak dari masih kuatnya pengaruh elit politik dalam proses pengambilan keputusan, minimnya perlindungan terhadap kelompok minoritas, serta penyalahgunaan aparat dan hukum untuk membungkam kritik. Kondisi ini mengingatkan bahwa demokrasi tidak hanya soal pelaksanaan pemilu lima tahunan, tetapi juga tentang menjamin kebebasan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam kehidupan sehari-hari. Maka, Indonesia perlu mengevaluasi praktik demokrasinya agar tidak hanya tampak demokratis di permukaan, tetapi juga menghidupkan semangat demokrasi yang sejati sesuai nilai-nilai Pancasila dan konstitusi.

Video ini menyoroti bahwa meskipun demokrasi bukan sistem yang sempurna dan penuh tantangan, ia tetap menjadi pilihan banyak negara karena kemampuannya dalam menjamin kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, demokrasi memerlukan partisipasi aktif dan kesadaran kolektif untuk terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan tantangan zaman.